

RINGKASAN

Laporan Hasil Pemantauan JKN-PBI



Model pemantauan program perlindungan sosial yang berbasis komunitas, berperspektif gender, inklusif dan transformatif dikembangkan oleh Institut KAPAL Perempuan sejak tahun 2010. Model ini untuk memberikan ruang pada perempuan dan warga miskin untuk terlibat memberikan penilaian terhadap program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah.

Pada bulan Oktober-Desember 2017, model ini digunakan untuk melakukan pemantauan program JKN-PBI (Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran). Orang biasa menyebutkan kartu BPJS gratis atau KIS untuk orang miskin. Di DKI Jakarta, pemantauan dilakukan di Kelurahan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Tim Pemantaunya adalah Anggota Sekolah Perempuan yang aktifitas sehari-harinya adalah ibu rumah tangga, pedagang sayur, nasi uduk, PRT, membuka warung kelontong.

Ada tiga aspek yang dipantau, yaitu Sosialisasi, Kepesertaan dan Pelayanan.

Hasil Temuan

Aspek Sosialisasi. Hasil temuan pemantauan pada aspek sosialisasi masih lemah. Sebanyak 84% (210) responden tidak pernah mengikuti sosialisasi meskipun ada 63,9% (159 orang) menyatakan tahu ada sosialisasi.

Dari 159 responden, sekitar 24,5% (39 orang) mengikuti kegiatan sosialisasi. Informasi yg didapat adalah manfaat program, hak dan kewajiban peserta. Setelah diperdalam dalam FGD, sosialisasi yang didapat bukan sosialisasi resmi dari BPJS tetapi informasi dari kelurahan, Puskesmas, kelompok



masyarakat, Sekolah Perempuan, kader, media dan kader di tingkat kelurahan dan ada dari BPJS tetapi tidak secara khusus kepada peserta JKN PBI tetapi lebih bersifat umum kepada peserta JKN mandiri.

Akibat minimnya sosialisasi tersebut, masih banyak masyarakat tidak paham hak dan kewajiban peserta terutama di Faskes 2, tidak paham pengaduan, perempuan tidak paham kartunya dapat digunakan memeriksakan kesehatan reproduksinya dan masih harus membayar untuk obat dan perawatan tertentu.



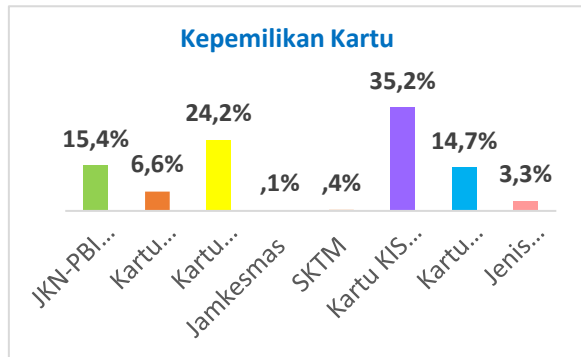
Aspek Kepesertaan. Dari sejumlah responden penerima JKN-PBI yang berjumlah 249 orang, semuanya telah memiliki kartu JKN-PBI, hanya 2,1% anggota keluarga responden belum mempunyai kartu. Bahkan masih banyak warga miskin yang bukan responden pemantauan masih belum JKN-PBI. Sebagian dari mereka dibantu oleh Sekolah Perempuan dan kelompok masyarakat untuk mengurus kartunya.

Sebagian besar responden adalah pemegang Kartu JKN-PBI tetapi masih ada yang memegang KIS (Kartu Indonesia Sehat), KJS (Kartu Jakarta Sehat), Jamkesmas dan SKTM.

Ini menunjukkan bahwa proses integrasi semua kartu masih belum selesai. BPJS Cabang Jaktim yang hadir dalam Konsultasi Publik juga menyatakan bahwa mulai tahun 2014 masih belum selesai sampai saat ini. Bahkan Masih ada ketidaksesuaian identitas NIK dan Kartu peserta. Meskipun di dalam survei 96,4% menyatakan kartu peserta sudah memasukkan NIK

tapi pada tanggal lahir semua ditulis tanggal 1 meski bulan berbeda.

Peserta JKN-PBI di Kelurahan Jatinegara Kaum

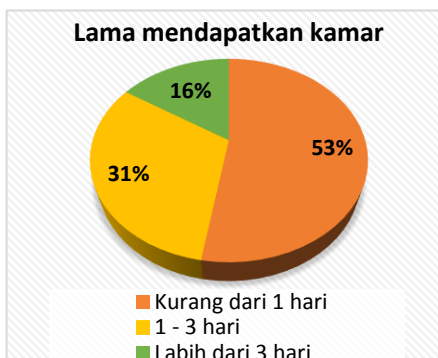


tergolong peserta aktif. Dari total penduduk yang di survai, sebanyak 88,3 persen sudah pernah memanfaatkan kartunya untuk berobat bahkan ada yang lebih dari satu kali. Hanya 11,7 persen belum pernah menggunakannya.

Aspek Pelayanan. Secara umum sebagian besar responden berobat di Faskes I. Pelayanan pada Faskes I atau Puskesmas sudah cukup memadai tetapi untuk faskes tingkat lanjut, seperti Rumah Sakit Umum di Tingkat Provinsi atau Daerah masih harus banyak yang diperbaiki.

Sebanyak 75,8% responden memeriksakan dirinya atau berobat di Puskesmas. Sedangkan 12,-nya, memeriksakan kesehatannya di RSUD Daerah, klinik swasta dan hanya 0,8% yang pernah dirujuk ke RS Provinsi. Dalam hal rujukan, sebanyak 68,2% responden, mengaku pernah mendapatkan rujukan.

Sebanyak 78,6% responden yang dirujuk ke Faskes tingkat lanjut tidak dirawat inap, hanya 21,4% pernah dirawat inap. Responden yang dirawat inap mengaku kesulitan mendapat kamar, harus menunggu 1-3 hari bahkan lebih. Mereka juga terpaksa mengeluarkan uang supaya cepat mendapatkan kamar dan masih mengeluarkan biaya untuk membeli obat, cek darah dan biaya administrasi.

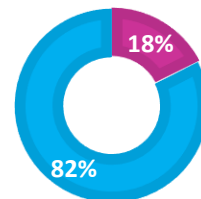


Pengalaman peserta konsultasi publik selain dari Sekolah Perempuan menyatakan bahwa banyak permasalahan yang dialami peserta JKN-PBI ini juga dialami oleh peserta JKN Mandiri, seperti sulit mendapatkan kamar, obat tidak tersedia di apotik rumah sakit. Karena kekhawatiran akan keselamatan anggota keluarganya maka biasanya mereka memilih untuk membeli obat meskipun harus mengeluarkan biaya yang besar.

Terkait pelayanan di tingkat Puskesmas (Faskes I), sebanyak 50,9 persen menyatakan puas terhadap seluruh indikator (kumulatif) dari aspek layanan, yaitu kebersihan ruangan, ketrampilan dan keramahan tenaga medis dan kehadiran dokter. Namun yang masih harus diperbaiki adalah lamanya menunggu antrian ketika berobat. Sebanyak 88,4%, menyatakan setuju dengan lamanya waktu menunggu ketika berobat (Puskesmas) antara ½-2 jam.

Pelayanan Kesehatan Reproduksi. Untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan kesehatan reproduksi (kespro) yang dapat diakses peserta JKN-PBI, dipilih informan yang semuanya perempuan. Sebagian dari mereka adalah responden sampling dan sebagian lainnya perempuan anggota keluarga informan laki-laki.

Pernah Periksa Kespro



■ Ya, pernah periksa ■ Tidak pernah periksa

Gambaran muram terlihat dari penggalan terkait kespro ini. Sebanyak 82,5% responden tidak tahu bahwa kartu JKN-PBI dapat digunakan untuk periksa kespro. Sebanyak 17% pernah menggunakan kartunya tapi karena ada indikasi sakit terkait kespro. Bahkan ada yang masih membayar pada saat pemeriksaan, sebanyak 9% responden. Ada 3,8% ada informan yang tahu terutama kader kesehatan di tingkat kelurahan tetapi tidak memeriksakan kespronya secara rutin karena takut. Terkait hal ini, penting untuk BPJS untuk memberikan penyuluhan sebagai pelayanan preventif seperti yang sudah dijanjikan.